

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG TERHADAP KONSERVASI SEMPADAN PANTAI DI KOTA CIREBON

Sri Wulandari, S.Sos., M.Si

## ABSTRACT

*The problem of this research are formulated in problem statement that effectiveness of beach demarcation conservation at Cirebon Municipality has low. That problem presumed caused by implementing policy of protection area management has not effective yet.*

*According to the problem statement mentioned above, the problem in this research identified in problem questions that :*

- a. How much influence of implementing of protection area management against effectiveness of beach demarcation conservation at Cirebon Municipality ?*
- b. How much influence of implementing policy of protection area management through implementing activity and organization communications, implementer agent characteristic, economic, social and politic conditions, and implementer dispositions against effectiveness of beach demarcation conservation at Cirebon Municipality ?*

*This research done by using survey method and quantitative analysis (Path Analysis). Data collected by using interview, observation, distributing questioner to the 93 respondents, and library study.*

*The conclusion of this research are :*

- 1. Implementing policy of protection area management has big influence against effectiveness of beach demarcation conservation at Cirebon Municipality.*
- 2. Implementing policy of protection area management through implementing activity and organization communications has small influence against effectiveness of beach demarcation conservation at Cirebon Municipality. Some weakness in implementing activity and organization communications are the less of apparatus understanding, the less in communication and coordination, specific Team unavailable, and less in socialization.*
- 3. Implementing policy of protection area management through implementer agent characteristic has small influence against effectiveness of beach demarcation conservation at Cirebon Municipality. Some weaknesses in implementer agent characteristic are not at all apparatus involve in policy implementation and npt at all apparatus got a relevant training.*
- 4. Implementing policy of protection area management through economic, social and politic conditions has small influence against effectiveness of beach demarcation conservation at Cirebon Municipality. Some weakness in economic, social and politic conditions are beach society poverty, less in social culture wisdom, and less in firm against transgressor.*
- 5. Implementing policy of protection area management through implementer dispositions has small influence against effectiveness of beach demarcation conservation at Cirebon Municipality. Some weaknesses in implementer dispositions are no specific intensive, less in apparatus discipline, and less in law enforcement.*

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan di Indonesia pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana, terprogram, dan sistematis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif di dalamnya.

Pembangunan nasional merupakan proses yang kompleks sehingga memerlukan banyak sumber, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana, dana, sumber daya alam, dan lain-lain. Berbagai sumber itu harus dikelola secara sinergis, sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan di segala bidang.

Salah satu sumber yang diperlukan dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga kelestariannya agar dapat menunjang pembangunan, dan sebaliknya pembangunan yang dilakukan tidak boleh merusak sumber daya alam yang ada.

Kawasan lindung merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Pengertian kawasan lindung menurut Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yaitu “Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan”.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008, telah ditetapkan bahwa Jawa Barat dibagi ke ruang kawasan lindung (45 %) dan ruang kawasan budi daya (55 %). Penetapan tersebut dalam rangka pencapaian visi Jawa Barat yaitu : “Dengan Iman dan Taqwa Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”.

Berbagai macam kawasan lindung tersebut harus dikelola dengan efektif agar kelestariannya tetap terjaga. Tujuan pengelolaan kawasan lindung di daerah menurut Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2006 yaitu untuk : Mewujudkan pencapaian kawasan lindung di Jawa Barat seluas 45 % pada tahun 2014, yang meliputi kawasan berfungsi lindung di dalam dan di luar kawasan hutan, mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa, mewujudkan pengelolaan kawasan lindung yang bertumpu pada kewenangan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan kearifan nilai budaya setempat, mengangkat, mengakui dan mengukuhkan hak-hak dasar masyarakat adat di Jawa Barat dalam penyelenggaraan, pelestarian dan pemulihan kawasan lindung, mewujudkan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antar daerah dan antar sektor, mewujudkan sistem informasi pengelolaan kawasan lindung, mewujudkan kelembagaan yang kuat, efektif dan responsif dalam pengelolaan kawasan lindung, memperluas dan menguatkan komitmen untuk membangun kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemangku kepentingan lainnya, menguatkan partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Kawasan lindung yang banyak terdapat di Kota Cirebon adalah Sempadan Pantai. Pengertian sempadan pantai menurut Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2006 yaitu “Kawasan

tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai”.

Kawasan lindung berupa sempadan pantai tersebut perlu dikelola dengan efektif dalam rangka mewujudkan efektivitas konservasi sempadan pantai, sehingga bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat pantai. Meskipun demikian, efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon rendah, dapat dilihat dari :

1. Belum tercapainya target penghijauan kawasan sempadan pantai, di mana dari wilayah sempadan pantai di Kota Cirebon sebanyak 40 Ha, baru 13 Ha (32,5 %) yang sudah dilakukan penghijauan.
2. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat pantai untuk berpartisipasi dalam mewujudkan konservasi sempadan pantai. Hal ini misalnya terlihat dari :
  - a. Terjadi perusakan/penebangan tanaman mangrove, di mana  $\pm$  3000 pohon di Kelurahan Kasepuhan yang ditanam tahun 2002, dibabat habis oleh masyarakat pada awal tahun 2007.
  - b. Terjadi pengurangan sempadan pantai, di mana di Kelurahan Pegambiran sebanyak tiga tambak diurug oleh masyarakat untuk dijadikan pemukiman.
3. Kawasan konservasi pantai di Kota Cirebon belum tertata sesuai dengan kualitas pengelolaan lingkungan pantai, misalnya terlihat dari kondisi wilayah pantai yang kotor karena dijadikan tempat pembuangan sampah rumah tangga dan limbah industri.

Kebijakan pengelolaan kawasan lindung oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagai *Leading Sector* beserta dinas/instansi terkait lamban dalam membenahi masalah konservasi sempadan pantai. Di akibatkan kurang tepatnya implementasi kebijakan tersebut terlihat dari:

1. Kurangnya komunikasi berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan dan konservasi kawasan sempadan pantai kepada masyarakat pantai.
2. Kurangnya koordinasi antara Kepala Kantor Lingkungan Hidup sebagai *Leading Sector* dengan Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Pertanian dan Kelautan, Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kecamatan, dan Kelurahan yang memiliki wilayah pantai.
3. Sikap aparat yang tidak tegas dalam penegakan hukum sebagaimana terlihat dari lemahnya sanksi terhadap masyarakat dan industri yang merusak atau mencemari wilayah pantai.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

2. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung berpengaruh besar terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Pengaruhnya besar sedangkan pengaruh variabel-variabel lain cukup besar. Hal ini berarti efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
3. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi berpengaruh relatif kecil terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi ini terdapat beberapa kelemahan yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman di kalangan aparat terkait di luar Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon tentang metode implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
  - b. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon dengan dinas/instansi lainnya yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
  - c. Belum ada Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Lindung/Sempadan Pantai yang beranggotakan Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan dinas/instansi lainnya yang terkait.
  - d. Kurang intensifnya penyuluhan kepada masyarakat pantai tentang pentingnya konservasi sempadan pantai.
4. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui karakteristik agen pelaksana berpengaruh relatif kecil terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui karakteristik agen pelaksana ini terdapat beberapa kelemahan yaitu :
    - a. Belum semua aparat terkait terlibat dalam aktivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung berupa sempadan pantai.
    - b. Belum semua terkait mengikuti diklat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
  5. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kondisi ekonomi sosial dan politik berpengaruh relatif kecil terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kondisi ekonomi sosial dan politik terdapat beberapa kelemahan yaitu :
    - a. Kemiskinan masyarakat pantai sehingga mereka merusak potensi kawasan pantai untuk keperluan pribadinya tanpa memperhatikan kelestariannya.
    - b. Kurangnya kearifan sosial budaya berupa kesadaran di kalangan masyarakat pantai tentang pentingnya kawasan sempadan pantai.
    - c. Kurangnya ketegasan terhadap para pelanggar yang merusak kelestarian kawasan pantai sebagai kawasan konservasi.
  6. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kecenderungan pelaksana berpengaruh relatif kecil terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kecenderungan pelaksana ini terdapat beberapa kelemahan yaitu :
    - a. Tidak ada insentif khusus bagi aparat pelaksana dan aparat terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
    - b. Kurangnya disiplin aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan pengawasan melekat dan kurang tegasnya kepada aparat yang indisipliner.
    - c. Kurangnya ketegasan aparat dalam penegakan hukum terhadap perusahaan atau masyarakat yang melanggar ketentuan konservasi sempadan pantai.

Mengemukakan saran kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon perlu meningkatkan kebijakan pengelolaan kawasan lindung dalam rangka meningkatkan efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon melalui :

1. Peningkatan aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi komunikasi dengan cara

- a. Meningkatkan pemahaman di kalangan aparat terkait di luar Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon tentang metode implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
  - b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon dengan dinas/instansi lainnya yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung, yaitu dengan Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kimpraswil, Kantor Pertanahan/BPN, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki wilayah pantai.
  - c. Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Lindung/Sempadan Pantai yang beranggotakan Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan dinas/instansi lainnya yang terkait.
  - d. Lebih mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat pantai tentang pentingnya konservasi sempadan pantai.
2. Peningkatan karakteristik agen pelaksana, dengan cara :
    - a. Melibatkan semua aparat terkait dalam aktivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung berupa sempadan pantai.
    - b. Mengikutsertakan aparat terkait dalam berbagai diklat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
  3. Menciptakan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kondusif dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung dengan cara :
    - a. Mengatasi kemiskinan ekonomi masyarakat pantai sehingga mereka tidak merusak potensi kawasan pantai untuk keperluan pribadinya saja tanpa memperhatikan kelestariannya.
    - b. Menumbuhkembangkan kearifan sosial budaya berupa kesadaran di kalangan masyarakat pantai tentang pentingnya kawasan sempadan pantai.
    - c. Menetapkan kebijakan yang lebih tegas dalam melindungi kawasan pantai sebagai kawasan konservasi.
  4. Peningkatan kecenderungan aparat pelaksana dengan cara :
    - a. Memberikan insentif khusus bagi aparat pelaksana dan aparat terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
    - b. Meningkatkan disiplin aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan pengawasan melekat dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada aparat yang indiscipliner.
    - c. Meningkatkan ketegasan sikap aparat dalam penegakan hukum terhadap perusahaan atau masyarakat yang melanggar ketentuan konservasi sempadan pantai.

### **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dalam bentuk pernyataan masalah (*problem statement*) yaitu : Efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon, rendah. Masalah tersebut diduga karena implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung yang kurang tepat

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan masalah (*problem question*) yaitu :

1. Berapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon ?
2. Berapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon ?
3. Berapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui karakteristik agen pelaksana terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon ?
4. Berapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kondisi ekonomi sosial dan politik terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon ?
5. Berapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kecenderungan pelaksana terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon.
2. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon.
3. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui karakteristik agen pelaksana terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon.
4. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kondisi ekonomi, sosial dan politik terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon.
5. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kecenderungan aparat pelaksana terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon.

### **KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik (dalam hal ini implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung).
2. Kegunaan praktis yaitu :
  - a. Memberikan masukan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagai *leading sector* dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon.
  - b. Sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasi (pengaturan), telah menetapkan berbagai kebijakan publik. Wujud kebijakan publik pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpu, Keputusan dan Instruksi Presiden,

Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat seluruh aparat pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan.

Ealau dan Prewitt dalam Suharto (2005 : 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah “Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya”.

Dunn (2000 : 36) mengemukakan tentang pengertian kebijakan publik sebagai berikut :

Kebijakan publik pada hakikatnya berupa pilihan tindakan-tindakan pemerintah yang dialokasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga kebijakan tersebut bersifat mengikat, mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan selalu dioorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

Dye dalam Thoha (2003 : 62) mengemukakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah “Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan”. Sedangkan menurut Easton dalam Thoha (2003 : 62), pengertian kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Kebijakan publik meliputi proses yang panjang dan berkesinambungan di mana satu sama lain saling berkaitan. Anderson dalam Subarsono (2005 : 12-13) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari :

1. Formulasi masalah (*problem formulation*).
2. Formulasi kebijakan (*formulation*).
3. Penentuan kebijakan (*adoption*).
4. Implementasi (*implementation*).
5. Evaluasi (*evaluation*).

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu proses dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang penting dari seluruh proses kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Patton dan Savicky dalam Nugroho (2004 : 92) bahwa “Implementasi kebijakan sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri sehingga kegagalan implementasi dianggap sama dengan kegagalan kebijakan”.

Pentingnya implementasi (pelaksanaan) kebijakan juga dikemukakan oleh Udoji dalam Wahab (2004 : 59) sebagai berikut :

Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Wahab (2004 : 64) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden”.

Pakar lainnya yaitu Nugroho (2004 : 158) menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Persoalan yang dibahas dalam implementasi kebijakan publik menurut Jones (1996 : 51) adalah “Siapa yang menjalankan kebijakan tersebut dan bagaimana mereka memelihara dukungan yang didapatkan?”. Dengan demikian, persoalan dalam implementasi kebijakan publik menyangkut implementor (pelaksana atau yang melaksanakan kebijakan) dan memelihara dukungan yang telah diperoleh.

Berhasil-tidaknya implementasi kebijakan publik dapat dinilai dengan cara melakukan analisis implementasi kebijakan. Hal ini ditegaskan oleh Tachjan (2006 : 21) mengemukakan bahwa “Analisis implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh banyak faktor. Edwards III (1980 : 10) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik ditentukan oleh empat faktor yaitu :

- a. Komunikasi (*communication*),
- b. Sumber-sumber (*resources*),
- c. Disposisi (*disposition*),
- d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Pakar lainnya yaitu Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2004 : 167) mengemukakan ada empat faktor dalam implementasi kebijakan yaitu :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
- b. Karakteristik agen pelaksana/implementor,
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- d. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor,

Model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2004 : 167).

Berkaitan dengan faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut, Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004 : 81) mengemukakan :

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.

Suatu kebijakan publik diimplementasikan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang dikehendaki. Tercapai-tidaknya tujuan atau sasaran tersebut diukur dengan kriteria efektivitas. Dengan demikian, kriteria untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran implementasi kebijakan publik adalah efektivitas.

Westra dkk., dalam Ensiklopedi Administrasi (1999 : 147) dijelaskan tentang pengertian efektivitas sebagai berikut :

Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya.

Etzioni dalam Indrawijaya (2000 : 12) mengemukakan efektivitas sebagai “Suatu usaha untuk mengukur sejauhmana keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan”. Sedangkan Siagian (1999 : 157) mengemukakan pengertian efektivitas sebagai berikut :

Kalau seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja, berarti yang menjadi sorotan perhatiannya adalah adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut.

Emerson dalam Handayani (1996 : 16) mengemukakan pengertian efektivitas sebagai berikut :

Efektif adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.

Soedjadi (1999 : 37) mengemukakan bahwa efektivitas berarti “Kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat, dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tetapi target-target itu harus dikaitkan dengan mutunya”.

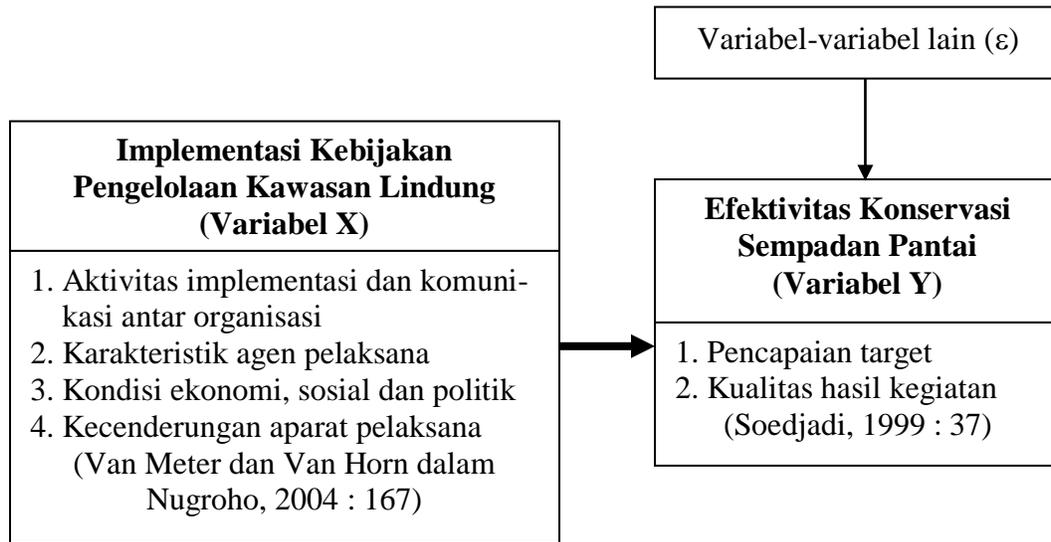
Dari sekian banyak pengertian efektivitas, penulis mengambil salah satu pengertian sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu pengertian efektivitas menurut Soedjadi di atas. Berdasarkan pengertian efektivitas yang dikemukakannya, maka kriteria efektivitas terdiri dari :

1. Pencapaian target.
2. Kualitas (mutu) hasil kegiatan.

Efektivitas suatu kegiatan atau program antara lain dipengaruhi oleh implementasi kebijakan. Hal ini ditegaskan oleh Abidin (2006 : 57) bahwa “Efektivitas (*effectiveness*) mengukur apakah sesuatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir (*outcomes = effect*) yang dikehendaki”. Dengan demikian, implementasi kebijakan akan mempengaruhi efektivitas suatu kegiatan atau program. Demikian pula halnya implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung akan mempengaruhi efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu : Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung yang di dalamnya meliputi : 1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2) karakteristik agen pelaksana, 3) kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta 4) kecenderungan pelaksana, berpengaruh terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai.

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam bentuk paradigma penelitian yaitu :



## OBJEK PENELITIAN

### Gambaran Umum Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat bagian timur dengan luas  $\pm 37$  km<sup>2</sup>. Kota Cirebon terletak di pantai utara bagian timur Jawa Barat dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-200 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan persentase kemiringan wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kemiringan 0 – 3 % tersebar di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Harjamukti.
2. Kemiringan 3 – 8 % tersebar di sebagian besar wilayah Kel. Kalijaga, sebagian kecil Kelurahan Harjamukti.
3. Kemiringan 8 – 15 % tersebar di sebagian besar wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
4. Kemiringan 15 – 25 % tersebar di sebagian besar wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.

Secara umum berdasarkan bentuk bentang alamnya, morfologi Kota Cirebon merupakan morfologi dataran rendah. Berdasarkan cara terjadinya dan batuan penyusunannya satuan dataran ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa unit saluran mikromorfologi, yaitu pematang pantai, dataran rawa, alur sungai lama, tanggul alam (*natural level*) dan dataran rendah.

Kota Cirebon secara administratif terdiri dari lima kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Harjamukti dengan luas 17,615 km<sup>2</sup>, terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Argasunya, Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, dan Kelurahan Larangan.

2. Kecamatan Kesambi dengan luas 8,059 km<sup>2</sup>, terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Drajat, Kelurahan Kesambi, dan Kelurahan Pekiringan.
3. Kecamatan Lemahwungkuk dengan luas 6,507 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk, dan Kelurahan Panjunan.
4. Kecamatan Pekalipan dengan luas 1,561 km<sup>2</sup> terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Jagasatru, dan Kelurahan Pekalangan.
5. Kecamatan Kejaksan dengan luas 3,616 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kebonbaru, dan Kelurahan Kesenden.

### **Gambaran Umum Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon**

Visi Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon yaitu : “Terwujudnya Kantor Pengelola Lingkungan Hidup sebagai fasilitator pengelola lingkungan hidup yang profesional menuju kota sehat pada tahun 2010 di Kota Cirebon”.

Adapun Misi Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kondisi ruang (lingkungan hidup; tanah, air, udara) yang terjaga kualitasnya serta memberikan ruang lingkup yang layak, sehat, aman, nyaman untuk kehidupan masa kini dan yang akan datang.
2. Mendorong para pelaku kegiatan ekonomi (industri, jasa, transportasi, dan lain-lain) untuk
3. memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif pada era perdagangan bebas yang berlandaskan isu internasional tentang ekolabeling dan produk hijau.

Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pengelolaan lingkungan hidup di Lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang pengelolaan lingkungan.
3. Pelayanan umum penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.
5. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon yaitu :

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
4. Seksi Analisis Dampak Lingkungan.
5. Seksi Pemulihan dan Pelestarian.

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Gambaran Umum Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon**

Sempadan pantai merupakan salah satu kawasan lindung. Pengertian kawasan lindung menurut Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yaitu “Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan”.

Kawasan lindung yang banyak terdapat di Kota Cirebon adalah Sempadan Pantai. Pengertian sempadan pantai menurut Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2006 yaitu “Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai”.

Kawasan lindung berupa sempadan pantai tersebut perlu dikelola dengan efektif dalam rangka mewujudkan efektivitas konservasi sempadan pantai, sehingga bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat pantai. Meskipun demikian, efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon rendah, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

#### **1. Kerusakan kawasan pantai**

Wilayah pantai Kota Cirebon adalah 70,54 Ha dan garis pantainya adalah sepanjang 7 km. Diperkirakan 10 – 15 % penduduk Kota Cirebon tinggal di kawasan pantai. Namun, kawasan pantai di Kota Cirebon belum tertata sesuai dengan pengelolaan lingkungan pantai, misalnya terlihat dari kondisi wilayah pantai yang kotor karena dijadikan tempat pembuangan sampah rumah tangga dan limbah industri. Selain itu, ada beberapa sungai yang melintasi Kota Cirebon berasal dari daerah lain, sehingga sampah-sampah yang berasal dari hulu sungai hanyut ke dalam sungai dan mengotori pantai Kota Cirebon. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan kualitas air laut di sekitar pantai Kota Cirebon yang disebabkan oleh air limbah domestik, sampah dan limbah industri yang dibawa saluran dan sungai.

Kerusakan lingkungan pantai Kota Cirebon antara lain disebabkan oleh faktor yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat.
- b. Kurang terencananya pengelolaan konservasi kawasan pantai.
- c. Kurangnya koordinasi perencanaan pengelolaan kawasan pantai.
- d. Kurangnya tenaga kerja dan kurangnya pendanaan.

Adanya manajemen pantai sangat berarti bagi penduduk di kawasan pantai yang miskin dan kekurangan. Hal ini memperlihatkan besarnya tantangan untuk mempertahankan kelestariannya dalam masa pembangunan ini. Peningkatan jumlah sampah dan air limbah di wilayah ini memberikan dampak pada lingkungan pantai Cirebon.

#### **2. Abrasi kawasan pantai**

Abrasi kawasan pantai terjadi di bagian utara kawasan pantai Kota Cirebon. Abrasi pantai yang terjadi kurang lebih 1000 m dari garis pantai disebabkan tidak tertatanya sempadan pantai. Arah kebijakan adalah Pengelolaan kawasan pantai berkelanjutan. Strategi yang dilakukan yaitu menerapkan penataan kelautan dan pantai secara terpadu, salah satunya adalah dengan penghijauan pantai.

Penghijauan pantai yang dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon yaitu dengan melakukan penanaman pohon bakau untuk melindungi daerah pantai dari abrasi air laut. Pohon bakau yang ditanam yaitu :

- a. Tahun 2001 ditanam 10.000 pohon bakau.

- b. Tahun 2002 ditanam 10.000 pohon bakau.
- c. Tahun 2003 ditanam 15.000 pohon bakau.
- d. Tahun 2004 ditanam 15.000 pohon bakau.

Meskipun demikian, usaha ini belum sukses karena kurang memadainya dana, petugas teknis dan personil lainnya. Kesadaran masyarakat pun kurang di mana pada tahun 2002 pernah ditanam  $\pm$  3000 pohon sebagai penghijauan pantai di Kelurahan Kasepuhan tetapi dibabat habis oleh masyarakat pada awal tahun 2007.

### **3. Sedimentasi pantai**

Sedimentasi pantai telah terjadi di kawasan pantai Kota Cirebon. Fospat, Nitrat dan Sedimentasi di muara pantai secara berangsur-angsur meningkat ke hulu. Sedimentasi sungai terutama terdapat di sungai Kalibaru dan Sukalila dari hulu Kabupaten Kuningan. Sedimentasi yang terdapat pada aliran sungai ini diharapkan dapat diambil agar air dapat mengalir ke muara dengan baik.

Sedimentasi terjadi pada semua sungai di Kota Cirebon mulai dari muara sampai sampai sekitar 1000 meter ke arah hulu sungai yang diakibatkan oleh pembuangan limbah padat maupun prose erosi yang pada akhirnya membawa dampak buruk terhadap pantai.

### **4. Intrusi air laut**

Intrusi air laut disebabkan oleh pemompaan air bawah tanah di kawasan pantai. Intrusi air laut meluas sampai kurang lebih 1000 meter ke arah daratan, saluran, sungai dan muara pantai. Kecenderungan intrusi air laut salah satunya disebabkan oleh pelanggaran terhadap pengambilan air bawah tanah yang tidak terpantau. Penyebab lainnya dari terjadinya intrusi air laut ini yaitu kawasan pantai dengan kondisi gundul, sehingga diperlukan sekali penghijauan dan penataan kawasan pantai di Kota Cirebon. Meskipun demikian, target penghijauan kawasan sempadan pantai tidak tercapai, di mana dari wilayah sempadan pantai di Kota Cirebon sebanyak 40 Ha, baru 13 Ha (32,5 %) yang sudah dilakukan penghijauan.

### **5. Kurangnya peran serta (partisipasi) masyarakat**

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon misalnya terlihat dari :

- a. Terjadi perusakan/penebangan tanaman mangrove, di mana  $\pm$  3000 pohon di Kelurahan Kesepuhan yang ditanam tahun 2002, dibabat habis oleh masyarakat pada awal tahun 2007.
- b. Terjadi pengurangan sempadan pantai, di mana di Kelurahan Pegambiran sebanyak tiga tambak diurug oleh masyarakat untuk dijadikan pemukiman.

Peran serta masyarakat terhadap kelestarian kawasan pantai Kota Cirebon salah satunya adalah dengan membentuk Kelompok Kerja Pelestarian Lingkungan Pantai Kota Cirebon yang dibentuk pada tahun 2001. Kelompok kerja tersebut terdapat di enam kelurahan yang wilayahnya memiliki pantai yaitu Kelurahan Kesenden, Kebon Baru, Panjunan, Lemahwungkuk, Kesepuhan dan Pegambiran, yang beranggotakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Peranserta aktif yang telah dilakukan kelompok kerja ini terhadap penghijauan pantai yaitu melakukan penanaman sekaligus pemeliharaan tanaman mangrove (bakau) di sepanjang pantai Kota Cirebon setiap tahunnya mulai dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Meskipun demikian, masyarakat pantai banyak yang merusak tanaman bakau tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon**

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008, telah ditetapkan bahwa Jawa Barat dibagi ke ruang kawasan lindung (45 %) dan ruang kawasan budi daya (55 %).

Kawasan Lindung merupakan salah satu kawasan yang harus dijaga kelestariannya. Menurut Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, pengertian Kawasan Lindung yaitu “Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan”.

Kawasan lindung di daerah menurut Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2006 meliputi :

2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, terdiri atas hutan lindung, kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung, dan kawasan resapan air.
3. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan situ, kawasan sekitar mata air, dan tanah timbul.
4. Kawasan suaka alam, terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa, suaka alam laut dan perairan lainnya, serta kawasan hutan payau.
5. Kawasan pelestarian alam, terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
6. Taman buru.
7. Kawasan perlindungan plasma nutfah
8. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
9. Kawasan konservasi geologi, terdiri atas kawasan cagar alam geologi dan kawasan kars.
10. Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas kawasan rawan bencana gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, dan kawasan rawan banjir.
11. Hutan kota

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung dalam tesis ini dianalisis dengan mengacu pada pendapat Van Matter dan Van Horn yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari empat faktor atau dimensi yaitu :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik agen pelaksana.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan aparat pelaksana.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung berdasarkan hasil angket memiliki skor 8805 (63,8 %) atau termasuk ke dalam skor sedang. Hal ini berarti Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung telah dilaksanakan dengan cukup efektif meskipun ada beberapa kelemahan di dalamnya yaitu :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi telah dilaksanakan dengan cukup efektif dan berdasarkan hasil angket memiliki skor 2859 (62,2 %). Kelemahan dalam aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi yaitu kurangnya pemahaman aparat terkait tentang metode pengelolaan kawasan lindung, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan kawasan lindung di Kota Cirebon, serta kurang intensifnya penyuluhan kepada masyarakat pantai tentang pentingnya kawasan lindung berupa sempadan pantai.
2. Karakteristik agen pelaksana cukup efektif dan berdasarkan hasil angket memiliki skor 2332 (63,4 %). Kelemahan dalam karakteristik agen pelaksana yaitu jumlah, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman aparat tidak menjamin implementasi kebijakan pengelolaan

kawasan lindung dapat dilaksanakan secara efektif, terutama jumlah, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman aparat terkait.

3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik cukup efektif dan berdasarkan hasil angket memiliki skor 1790 (63,7 %). Kelemahan dalam kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu kemiskinan ekonomi masyarakat pantai menyebabkan mereka cenderung memanfaatkan kawasan pantai tanpa mempertimbangkan kelestariannya, adanya kondisi sosial berupa kearifan budaya masyarakat pantai kurang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung/ sempadan pantai, dan kebijakan politik yang diambil pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung terwujudnya efektivitas pengelolaan kawasan sempadan pantai.
4. Kecenderungan aparat pelaksana cukup efektif dan berdasarkan hasil angket memiliki skor 1824 (66,1 %). Kelemahan dalam kecenderungan aparat pelaksana yaitu minimnya insentif menyebabkan aparat kurang bersemangat dalam bekerja dan lemahnya sikap aparat dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pengelolaan kawasan pantai.

Adanya beberapa kelemahan tersebut menyebabkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung berdasarkan hasil angket hanya memiliki skor 8805 (63,8 %) yang berarti termasuk ke dalam skor sedang atau hanya berada dalam kategori cukup efektif. Hal ini menyebabkan Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon kurang efektif, di mana berdasarkan hasil angket hanya memiliki skor 5643 (61,3 %) atau baru berada dalam kategori cukup efektif.

Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung yang kurang efektif di atas menyebabkan efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon belum tercapai, di mana berdasarkan hasil angket hanya diperoleh skor total 5642 (61,3 %) atau hanya berada dalam kategori cukup efektif, dengan rincian :

1. Dimensi pencapaian target, skor = 2983 (64,8 %), terdiri dari :
  - a. Pencapaian sasaran (item 31 dan 36), skor = 307 dan 296. Hal ini menunjukkan pencapaian sasaran belum sepenuhnya tercapai yaitu kawasan pantai belum sepenuhnya menjadi kawasan konservasi.
  - b. Pencapaian tujuan (item 32 dan 37), skor = 309 dan 321. Hal ini menunjukkan pencapaian tujuan juga belum sepenuhnya tercapai yaitu kawasan pantai belum sepenuhnya menjadi kawasan konservasi.
  - b. Pencapaian target (item 33 dan 38), skor 312 dan 243. Hal ini menunjukkan pencapaian target belum sepenuhnya tercapai, misalnya dalam target penghijauan pantai yang ditargetkan dari wilayah sempadan pantai di Kota Cirebon sebanyak 40 Ha, baru 13 Ha (32,5 %) yang sudah dilakukan penghijauan.
    - a. Ketepatan waktu (item 34 dan 39), skor 297 dan 338. Hal ini menunjukkan ketepatan waktu belum tercapai di mana banyak kegiatan yang tidak sesuai target waktu yang ditetapkan misalnya pada tahun 2008 ini ditargetkan penghijauan 20 hektar tetapi realisasinya belum.
    - b. Pemanfaatan sempadan pantai secara efektif (item 35 dan 40), skor = 265 dan 295. Hal ini menunjukkan sempadan pantai belum dimanfaatkan secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dimensi kualitas hasil kegiatan, skor = 2659 (57,8 %), terdiri dari :
  - a. Kualitas kawasan pantai (item 41 dan 46), skor = 259 dan 227. Hal ini menunjukkan kawasan pantai di Kota Cirebon kurang berkualitas yaitu terjadi kerusakan, pencemaran, abrasi, sedimentasi, dan intrusi air laut.

- b. Penataan kawasan pantai (item 42 dan 47), skor 293 dan 224. Hal ini menunjukkan penataan kawasan pantai di Kota Cirebon belum tertata rapih yaitu banyak sempadan pantai yang beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan pemukiman penduduk.
- c. Pemberdayaan masyarakat pantai (item 43 dan 48), skor 354 dan 239. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberdayaan masyarakat telah dilakukan tetapi hasilnya kurang efektif karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam memelihara kawasan pantai sebagai kawasan konservasi.
- d. Kesejahteraan masyarakat pantai (item 44 dan 49), skor 329 dan 233. Hal ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat pantai kurang tercapai karena masyarakat pantai banyak yang miskin, padahal sempadan pantai sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang menunjang kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusaknya.
- e. Partisipasi masyarakat pantai (item 45 dan 50), skor 266 dan 235. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pantai masih rendah seperti membuang sampah di sempadan pantai, menjadikan sempadan pantai sebagai pemukiman, dan membabat habis tanaman mangrove (bakau) yang telah ditanam oleh Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, konservasi sempadan pantai yang kurang efektif tersebut disebabkan atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung yang kurang efektif. Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil yaitu pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon adalah sebesar 72,5 %, yang berarti pengaruhnya tergolong besar. Sedangkan pengaruh variabel-variabel lain hanya sebesar 27,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon adalah dominan. Dengan kata lain, Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung.

#### **4.6.2. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Melalui Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi Terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon**

Dimensi pertama dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung adalah Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi. Skor dimensi ini berdasarkan hasil angket adalah sebesar 2859 (62,2 %) yang berarti cukup efektif, yang terdiri dari beberapa indikator :

1. Metode yang digunakan (item 1 dan 6) dengan skor 372 dan 222. Hal ini berarti metode yang digunakan cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, metode yang digunakan sudah tepat antara lain berupa penyuluhan, penghijauan, penanganan kerusakan pantai, dan melibatkan partisipasi masyarakat, Kelompok Kerja (Pokja) dan LSM dalam pengelolaan kawasan pantai. Meskipun demikian, aparat terkait di luar Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon banyak yang kurang memahami metode tersebut, sehingga menghambat kelancaran tugas yang menjadi bidangnya masing-masing dalam koordinasi.
2. Dukungan dana (item 2 dan 7) dengan skor 361 dan 308. Hal ini berarti dukungan dana cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, dukungan dana untuk pengelolaan kawasan hutan lindung berupa sempadan pantai di Kota Cirebon cukup memadai meskipun perlu ditingkatkan. Pengelolaan kawasan lindung berupa sempadan pantai di Kota Cirebon bahkan

menjadi salah satu prioritas dalam program kerja Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

3. Kelengkapan sarana dan prasarana (item 3 dan 8) dengan skor 364 dan 329. Hal ini berarti kelengkapan sarana dan prasarana cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana cukup memadai, sehingga mendukung implementasi kebijakan pengelolaan kawasan hutan lindung.
4. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi (item 4 dan 9) dengan skor 297 dan 228. Hal ini berarti komunikasi dan koordinasi kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat kelemahan yang menonjol yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon (sebagai *leading sector*) dengan dinas/instansi lain yang terkait yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kimpraswil, Kantor Pertanahan/BPN, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki wilayah pantai.
5. Penyuluhan kepada masyarakat (item 5 dan 10) dengan skor 268 dan 210. Hal ini berarti penyuluhan kepada masyarakat kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara, dalam hal ini masih terdapat kelemahan yaitu kurang intensifnya penyuluhan kepada masyarakat pantai, sehingga banyak masyarakat pantai yang sengaja atau tidak sengaja merusak kawasan pantai.

Adanya beberapa kelemahan di atas menyebabkan pelaksanaan dimensi Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi kurang efektif. Skor dimensi ini berdasarkan hasil angket adalah sebesar 2859 (62,2 %). Hal ini berarti Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi hanya berada dalam kategori cukup efektif.

Kondisi di atas berpengaruh terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon. Berdasarkan olah data diperoleh hasil besarnya pengaruh Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon adalah sebesar 21,9 %. Pengaruh dimensi ini paling besar apabila dibandingkan dengan pengaruh ketiga dimensi lainnya.

#### **4.6.3. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Melalui Karakteristik Agen Pelaksana Terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon**

Dimensi kedua dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung adalah Karakteristik Agen Pelaksana. Skor dimensi ini berdasarkan hasil angket adalah sebesar 2332 (63,4 %) yang berarti cukup efektif, yang terdiri dari beberapa indikator :

1. Jumlah aparat (item 11 dan 15) dengan skor 313 dan 246. Hal ini berarti jumlah aparat cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun jumlah aparat cukup memadai, tetapi hal tersebut belum menjamin Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebabnya antara lain meskipun Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon didukung oleh aparat terkait dengan jumlah yang memadai, tetapi pada prakteknya aparat terkait yang terjun langsung dalam aktivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung berupa sempadan pantai hanya beberapa orang saja.
2. Pengetahuan aparat (item 12 dan 16) dengan skor 342 dan 258. Hal ini berarti pengetahuan aparat cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, pengetahuan aparat Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon cukup memadai, tetapi tidak demikian halnya dengan pengetahuan aparat terkait.

3. Pengalaman aparat (item 13 dan 17) dengan skor 316 dan 269. Hal ini berarti pengetahuan aparat cukup memadai. Berdasarkan hasil wawancara, pengalaman aparat Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon cukup memadai, tetapi tidak demikian halnya dengan pengetahuan aparat terkait.
4. Keterampilan aparat (item 14 dan 18) dengan skor 305 dan 283. Hal ini berarti keterampilan aparat cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, keterampilan aparat Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon cukup memadai, tetapi tidak demikian halnya dengan pengetahuan aparat terkait.

Adanya beberapa kelemahan di atas menyebabkan pelaksanaan dimensi Karakteristik Agen Pelaksana kurang efektif. Skor dimensi ini berdasarkan hasil angket adalah sebesar 2332 (63,4 %). Hal ini berarti Karakteristik Agen Pelaksana hanya berada dalam kategori cukup efektif.

Kondisi di atas berpengaruh terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon. Berdasarkan olah data diperoleh hasil besarnya pengaruh Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon adalah sebesar 16,2 %.

#### **4.6.4. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Melalui Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon**

Dimensi ketiga dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung adalah Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik. Skor dimensi ini berdasarkan hasil angket adalah sebesar 1790 (63,7 %) yang berarti cukup efektif, yang terdiri dari beberapa indikator :

1. Kondisi ekonomi (item 19 dan 22) dengan skor 335 dan 252. Hal ini berarti kondisi ekonomi cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, secara ekonomis dapat dikatakan bahwa kawasan lindung berupa sempadan pantai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah. Namun di sisi lain, kemiskinan ekonomi masyarakat pantai menyebabkan mereka cenderung memanfaatkan kawasan pantai untuk kepentingan kehidupan pribadinya tanpa mempertimbangkan kelestariannya.
2. Kondisi sosial (item 20 dan 23) dengan skor 363 dan 319. Hal ini berarti kondisi sosial cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, kawasan lindung berupa sempadan pantai memiliki nilai sosial, sehingga harus dijaga kelestariannya oleh masyarakat pantai dengan kearifan sosial budaya lokal yang berkembang. Meskipun demikian, kondisi sosial berupa kearifan budaya masyarakat pantai tersebut kurang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung/sempanan pantai. Hal ini terbukti banyak masyarakat yang secara sengaja atau tidak sengaja merusak kawasan pantai, bahkan memabat pohon mangrove hasil penghijauan.
3. Kondisi politik (item 21 dan 24) dengan skor 319 dan 262. Hal ini berarti kondisi politik cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kota Cirebon memiliki *political will* yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kawasan lindung berupa sempadan pantai. Hal ini karena dari tahun ke tahun kerusakan pantai di Kota Cirebon semakin mengkhawatirkan. Meskipun demikian, kebijakan politik yang diambil pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung terwujudnya efektivitas pengelolaan kawasan sempadan pantai. Hal ini terlihat dari kurang tegasnya sanksi terhadap perusahaan atau masyarakat yang mencemari kawasan pantai.

Adanya beberapa kelemahan di atas menyebabkan pelaksanaan dimensi Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik kurang efektif. Skor dimensi ini berdasarkan hasil angket adalah sebesar 1790

(63,7 %). Hal ini berarti Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik hanya berada dalam kategori cukup efektif.

Kondisi di atas berpengaruh terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon. Berdasarkan olah data diperoleh hasil besarnya pengaruh Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon adalah sebesar 14,8 %.

#### **4.6.5. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Melalui Kecenderungan Aparat Pelaksana Terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon**

Dimensi keempat dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung adalah dimensi Kecenderungan Aparat Pelaksana. Skor dimensi ini berdasarkan hasil angket adalah sebesar 1824 (66,1 %) yang berarti cukup efektif, yang terdiri dari beberapa indikator :

1. Motivasi aparat (item 25 dan 28) dengan skor 336 dan 241. Hal ini berarti motivasi aparat cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, telah timbul kesadaran di kalangan aparat pelaksana bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung/semipadan pantai perlu didukung oleh motivasi yang tinggi dari aparat pelaksana. Meskipun demikian, pada prakteknya insentif yang diberikan kepada aparat sangat minim, sehingga aparat kurang termotivasi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Disiplin aparat (item 26 dan 29) dengan skor 385 dan 242. Hal ini berarti disiplin aparat cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, telah timbul kesadaran di kalangan aparat pelaksana bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung/semipadan pantai perlu didukung oleh disiplin yang tinggi dari aparat pelaksana. Meskipun demikian, pada prakteknya aparat pelaksana tidak sepenuhnya bekerja dengan disiplin dengan mengikuti peraturan, instruksi, dan prosedur yang ditetapkan.
3. Sikap aparat (item 27 dan 304) dengan skor 368 dan 252. Hal ini berarti sikap aparat cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, telah timbul kesadaran dan menjadi kewajiban aparat pelaksana bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung/semipadan pantai perlu didukung oleh sikap aparat yang tegas dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, pada prakteknya sikap aparat dalam penegakan hukum masih kurang tegas. Hal ini terlihat dari kurangnya sanksi kepada perusahaan atau masyarakat yang melakukan perusakan kawasan pantai.

Adanya beberapa kelemahan di atas menyebabkan pelaksanaan dimensi Kecenderungan Aparat Pelaksana kurang efektif. Skor dimensi ini berdasarkan hasil angket adalah sebesar 1824 (66,1 %). Hal ini berarti Kecenderungan Aparat Pelaksana hanya berada dalam kategori cukup efektif.

Kondisi di atas berpengaruh terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon. Berdasarkan olah data diperoleh hasil besarnya pengaruh Kecenderungan Aparat Pelaksana terhadap Efektivitas Konservasi Sempadan Pantai di Kota Cirebon adalah sebesar 19,6 %.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung berpengaruh besar terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Pengaruhnya besar sedangkan pengaruh variabel-variabel lain cukup besar. Hal ini berarti efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi berpengaruh relatif kecil terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi ini terdapat beberapa kelemahan yaitu :
  - a. Kurangnya pemahaman di kalangan aparat terkait di luar Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon tentang metode implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
  - b. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon dengan dinas/instansi lainnya yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
  - c. Belum ada Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Lindung/Sempadan Pantai yang beranggotakan Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan dinas/instansi lainnya yang terkait.
  - d. Kurang intensifnya penyuluhan kepada masyarakat pantai tentang pentingnya konservasi sempadan pantai.
3. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui karakteristik agen pelaksana berpengaruh relatif kecil terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui karakteristik agen pelaksana ini terdapat beberapa kelemahan yaitu :
  - a. Belum semua aparat terkait terlibat dalam aktivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung berupa sempadan pantai.
  - b. Belum semua terkait mengikuti diklat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
4. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kondisi ekonomi sosial dan politik berpengaruh relatif kecil terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kondisi ekonomi sosial dan politik terdapat beberapa kelemahan yaitu :
  - d. Kemiskinan masyarakat pantai sehingga mereka merusak potensi kawasan pantai untuk keperluan pribadinya tanpa memperhatikan kelestariannya.
  - e. Kurangnya kearifan sosial budaya berupa kesadaran di kalangan masyarakat pantai tentang pentingnya kawasan sempadan pantai.
  - f. Kurangnya ketegasan terhadap para pelanggar yang merusak kelestarian kawasan pantai sebagai kawasan konservasi.
5. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kecenderungan pelaksana berpengaruh relatif kecil terhadap efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung melalui kecenderungan pelaksana ini terdapat beberapa kelemahan yaitu :

- a. Tidak ada insentif khusus bagi aparat pelaksana dan aparat terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
- b. Kurangnya disiplin aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan pengawasan melekat dan kurang tegasnya kepada aparat yang indisipliner.
- c. Kurangnya ketegasan aparat dalam penegakan hukum terhadap perusahaan atau masyarakat yang melanggar ketentuan konservasi sempadan pantai.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan saran yaitu Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon perlu meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung dalam rangka meningkatkan efektivitas konservasi sempadan pantai di Kota Cirebon melalui :

1. Peningkatan aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi komunikasi dengan cara :
  - a. Meningkatkan pemahaman di kalangan aparat terkait di luar Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon tentang metode implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
  - b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon dengan dinas/instansi lainnya yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung, yaitu dengan Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kimpraswil, Kantor Pertanahan/BPN, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki wilayah pantai.
  - c. Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Lindung/Sempadan Pantai yang beranggotakan Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan dinas/instansi lainnya yang terkait.
  - d. Lebih mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat pantai tentang pentingnya konservasi sempadan pantai.
2. Peningkatan karakteristik agen pelaksana, dengan cara :
  - a. Melibatkan semua aparat terkait dalam aktivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung berupa sempadan pantai.
  - b. Mengikutsertakan aparat terkait dalam berbagai diklat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
3. Menciptakan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kondusif dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung dengan cara :
  - a. Mengatasi kemiskinan ekonomi masyarakat pantai sehingga mereka tidak merusak potensi kawasan pantai untuk keperluan pribadinya saja tanpa memperhatikan kelestariannya.
  - b. Menumbuhkembangkan kearifan sosial budaya berupa kesadaran di kalangan masyarakat pantai tentang pentingnya kawasan sempadan pantai.
  - c. Menetapkan kebijakan yang lebih tegas dalam melindungi kawasan pantai sebagai kawasan konservasi.
4. Peningkatan kecenderungan aparat pelaksana dengan cara :

- a. Memberikan insentif khusus bagi aparat pelaksana dan aparat terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan lindung.
- b. Meningkatkan disiplin aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan pengawasan melekat dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada aparat yang indisipliner.
- c. Meningkatkan ketegasan sikap aparat dalam penegakan hukum terhadap perusahaan atau masyarakat yang melanggar ketentuan konservasi sempadan pantai.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zaenal. 2006. **Kebijakan Publik**. Suara Bebas, Jakarta

Agustino, Leo. 2006. **Dasar-dasar Kebijakan Publik**. Alfabeta, Bandung

-----, 2006. **Politik dan Kebijakan Publik**. AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung

Al Rasjid, Harun. 1999. **Analisis Jalur**. Program Pascasarjana Unpad, Bandung

-----, 1999. **Teknik Penarikan Sampel dan Pembuatan Skala**. Program Pascasarjana Unpad, Bandung

-----, 1999. **Statistik Sosial**. Program Pascasarjana Unpad, Bandung

Dimock, Marshall Edward dan Dimock, Gladys Ogden. 1994. **Administrasi Negara**. Aksara Baru, Jakarta

Dunn, William N. 2000. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Edwards III, George C. 1980. **Implementing Public Policy**. Congressional Quaterly Press, Washington DC

Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly, James H. 1998. **Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses**. Erlangga, Jakarta

Handayaniingrat, Soewarno. 1996. **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen**. Toko Gunung Agung, Jakarta

Indrawidjaja, Adam I. 2000. **Perilaku Organisasi**. Sinar Baru Algesindo, Bandung

Islamy, Irfan. 2003. **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**. Bumi Aksara, Jakarta

Jones, Charles O. 2004. **Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)**. RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Komarudin. 1994. **Manajemen Berdasarkan Sasaran**. Bumi Aksara, Jakarta
- Nugroho D, Riant. 2004. **Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**. Elex Media Komputindo, Jakarta
- , 2004. **Analisis Kebijakan**. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Poerwadarminta, WJS. 1987. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka, Jakarta
- Rahmat, Jalaludin. 2003. **Metode Penelitian Komunikasi**. Bina Aksara, Jakarta
- Serdamayanti. 2005. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju, Bandung
- Siagian, Sondang P. 1999. **Fungsi-fungsi Manajerial**. Bumi Aksara, Jakarta
- Sitepu, Nirwana K. 1994. **Analisis Jalur (Path Analysis)**. Program Pascasarjana Unpad, Bandung
- Soedjadi, F.X. 1999. **O & M. Organization and Methods. Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen**. Haji Masagung, Jakarta
- Soekarno, 1998. **Dasar-dasar Manajemen**. Bina Cipta, Jakarta
- Subarsono. 2005. **Analisis Kebijakan Publik**. Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono. 2003. **Metode Penelitian Administrasi**. Alfabeta, Bandung
- , 2003. **Statistik Untuk Penelitian**. Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2005. **Analisis Kebijakan Publik**. Alfabeta, Bandung
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. **Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**. Citra Utama, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana; Tandjung, Djamaludin; Modeong, Supardan. 1999. **Ilmu Administrasi Publik**. Rineka Cipta, Jakarta
- Tachjan. 2006. **Implementasi Kebijakan Publik**. AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung
- Thoha, Miftah. 2003. **Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara**. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. **Pengantar Administrasi Pembangunan**. LP3ES, Jakarta

Wahab, Solichin Abdul. 2004. **Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Bumi Aksara, Jakarta

Waldo, Dwight. 1994. **Pengantar Studi *Public Administration***. Aksara Baru, Jakarta  
Westra, Pariata., dkk (ed.). 1999. **Ensiklopedi Administrasi**. Haji Masagung, Jakarta

**Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang **Pengelolaan Kawasan Lindung**